



MAHKAMAH AGUNG RI

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI Lt. 6 - 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 , Cempaka Putih, Jakarta 10510

Telepon 021-29079177; Fak 021- 29079277, 29079211

Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id

e-mail : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 323/DJA/HM.00/1/2021

29 Januari 2021

Lamp. : -

Hal : Usul Penilaian Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK di lingkungan peradilan agama Tahun 2021

Yth.

Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Agama

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan penilaian pembangunan Zona Integritas di 4 (empat) lingkungan peradilan untuk tahun 2021, maka dengan ini kami minta agar Saudara segera mengusulkan nama-nama pengadilan di wilayah hukum Saudara untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal Mahkamah Agung, dengan ketentuan :

1. Satuan kerja yang diusulkan adalah MS/PA dan MS Aceh/PTA yang belum memperoleh predikat WBK atau WBBM;
2. Sudah melakukan pencahangan pembangunan Zona Integritas, dengan melampirkan Fotocopi Piagam Pencahangan Zona Integritas;
3. Sudah melaksanakan pembangunan Zona Integritas, dengan melampirkan laporan pembangunan Zona Integritas tahun 2020;
4. Sudah memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Untuk penilaian predikat WBK :
 - 1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
 - 2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
 - 3) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
 - 4) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" (hasil survey kepuasan masyarakat) minimal 16
 - b. Untuk Penilaian predikat WBBM
 - 1) Telah mendapatkan predikat Menuju WBK;
 - 2) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85 dengan minimal nilai pengungkit adalah 48;
 - 3) Bobot nilai per area pengungkit minimal 75% untuk semua area pengungkit;
 - 4) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
 - 5) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" (hasil survey kepuasan masyarakat) minimal 18.

Nilai komponen pengungkit dan hasil dituangkan dalam format sebagaimana terlampir.

5. Memiliki Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu berpredikat "A".
6. Nilai AKIP minimal "B".

Usul tersebut ditujukan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dengan lampiran sebagaimana tersebut pada angka 2 dan 3 di atas, dan dikirim melalui email ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id cc ditbinadmin.badilag@mahkamahagung.go.id, cc bimon.badilag@gmail.com paling lambat 19 Pebruari 2021.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam,
Direktur Jenderal

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat
 Dirjen Badan Peradilan Agama
 Nomor : 323/DJA/HM.00/1/2021
 Tanggal : 29 Januari 2021

Tabel Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas
 Tahun 2020

I. Usul Satker Untuk Penilaian WBK

NO	NAMA SATKER	NILAI PMPZI									
		PENGUNGKIT						HASIL			TOTAL NILAI
		AREA I	AREA II	AREA III	AREA IV	AREA V	AREA VI	BERSIH DAN BEBAS DARI KKN		IKM	
IPAK	TLHP										
1.	PTA										
2.	PA										

II. Usul Satker Untuk Penilaian WBBM

NO	NAMA SATKER	NILAI PMPZI									
		PENGUNGKIT						HASIL			TOTAL NILAI
		AREA I	AREA II	AREA III	AREA IV	AREA V	AREA VI	IPAK	TLHP	IKM	
1.	PA										
2.	PA										

Ket.

- 1. Area I = Manajemen Perubahan
- 2. Area II = Penataan Tatalaksana
- 3. Area III = Penataan Sistem Manajemen SDM
- 4. Area IV = Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 5. Area V = Penguatan Pengawasan

6. Arsea VI = Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7. IPAK = Indeks Persepsi Anti Korupsi (hasil dari survey anti korupsi)
8. TLHP = Tindaklanjut dari Hasil Pemeriksaan.
9. IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat (hasil dari survey kepuasan masyarakat)